

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Telkom University adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2013, yang mana merupakan penggabungan dari empat institusi yang berada di bawah badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), yaitu; Institut Teknologi Telkom (IT Telkom); Institut Manajemen Telkom (IM Telkom); Politeknik Telkom; dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom). Telkom University terdiri dari tujuh fakultas dan tiga puluh empat program studi. Pada saat penulisan skripsi ini terdapat 935 dosen dan tenaga pengajar aktif beserta dan 32.358 mahasiswa. Lokasi Telkom University terbagi ke dalam dua wilayah. Sebagian kampus berlokasi di wilayah Gegerkalong Hilir, sebelah utara Kota Bandung, dalam kompleks perkantoran PT. Telkom (*Telkom Innovation and Development Center dan Telkom Corporate University/Telkom Training Center*). Sementara lokasi selanjutnya berada di kawasan Bandung Technoplex, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, 40257.

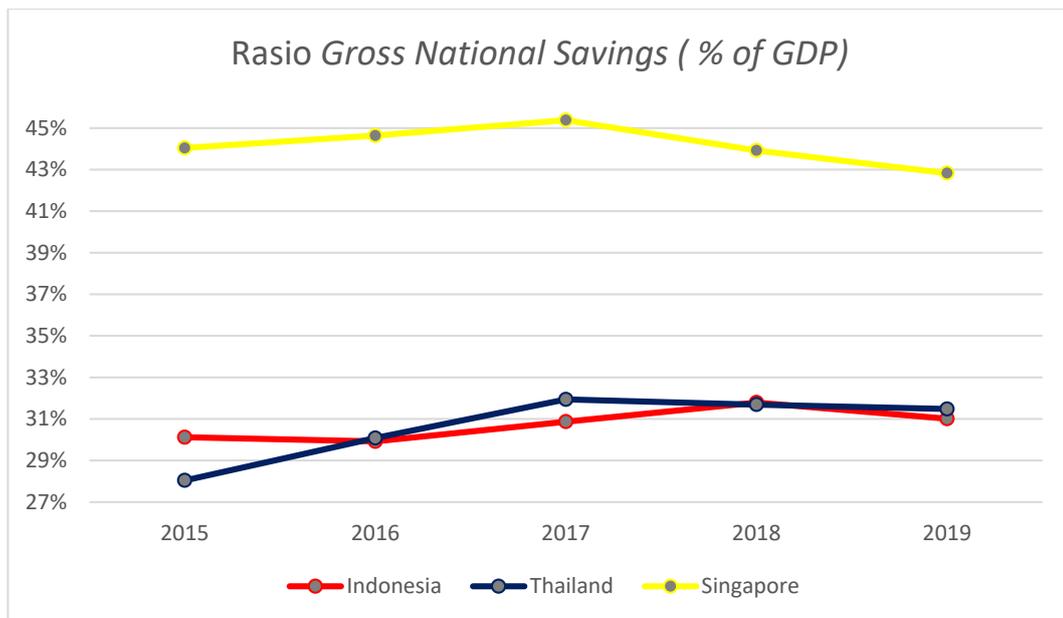
Provinsi Jawa Barat sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan, secara geografis Kecamatan Dayeuhkolot merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara Kecamatan Dayeuhkolot berbatasan dengan Kota Bandung (Kecamatan Bandung Kidul dan Bojongloa Kidul)
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baleendah
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bojongsoang
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Margahayu

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Dayeuhkolot sebagian besar merupakan dataran rendah, sedangkan di bagian utara merupakan wilayah perkotaan Administratif Kota Bandung.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat saat ini relatif dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan pun kian semakin beragam. Masyarakat juga cenderung menjadi semakin konsumtif dan meninggalkan kebiasaan menabung pada era sekarang ini. Berdasarkan data The World Bank dapat diketahui bahwa rasio *Gross National Savings* per GDP Indonesia pada tahun 2019 berada di level 31.01 persen. Rasio tersebut berada di bawah Thailand yaitu sebesar 31,48 persen dan Singapore sebesar 42,83 persen. Walaupun terdapat tren meningkat, minat menabung masyarakat Indonesia masih cenderung rendah jika dibandingkan dengan dua negara tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut ini:



Gambar 1.1 Rasio Gross National Savings (% of GDP) Tahun 2015-2019

(Sumber: Data Diolah The World Bank, 2020)

Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan, perilaku konsumtif yang meningkat bisa dilihat dari menurunnya *Marginal Propensity to Save (MPS)* dan naiknya *Marginal Propensity to Consume (MPC)* pada tahun 2013 sampai 2015 (*ekonomi.kompas.com, 2015*). Menilik hasil survey Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2019 menyatakan bahwa *average propensity to consume ratio*

mengalami tren kenaikan menjadi sebesar 68,5 persen sementara *saving to income ratio* relatif stagnan pada suku 20 persen.

Dampak negatif dari perilaku konsumtif seperti dapat membiasakan seseorang untuk memiliki pola hidup yang boros, menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tidak terpuji seperti pencurian, penipuan, dan sebagainya. Perkembangan *platform* belanja *online* juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan akses pemenuhan kebutuhan menjadi lebih mudah sehingga dapat mendorong perilaku konsumtif masyarakat. Masyarakat sebaiknya memiliki pengetahuan keuangan serta *skill* untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dengan tujuan mencapai kesejahteraan, yang mana diartikan sebagai literasi keuangan (Lusardi dan Mitchel, 2007).

Sehubungan dengan itu, pemahaman masyarakat akan layanan dan lembaga keuangan menjadi penting karena akan mempengaruhi perilaku keuangan mereka. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan semakin giat melaksanakan program literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan literasi keuangan saat ini telah menjadi isu global. Seperti yang dikemukakan oleh Atkinson dan Messy (2013) yang mengatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan pilar yang penting dalam memperkuat layanan keuangan. Pemberdayaan konsumen melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif. Huston (2010) mendefinisikan literasi keuangan sebagai proses mengukur seberapa baik individu dapat memahami dan menggunakan informasi keuangan pribadi.

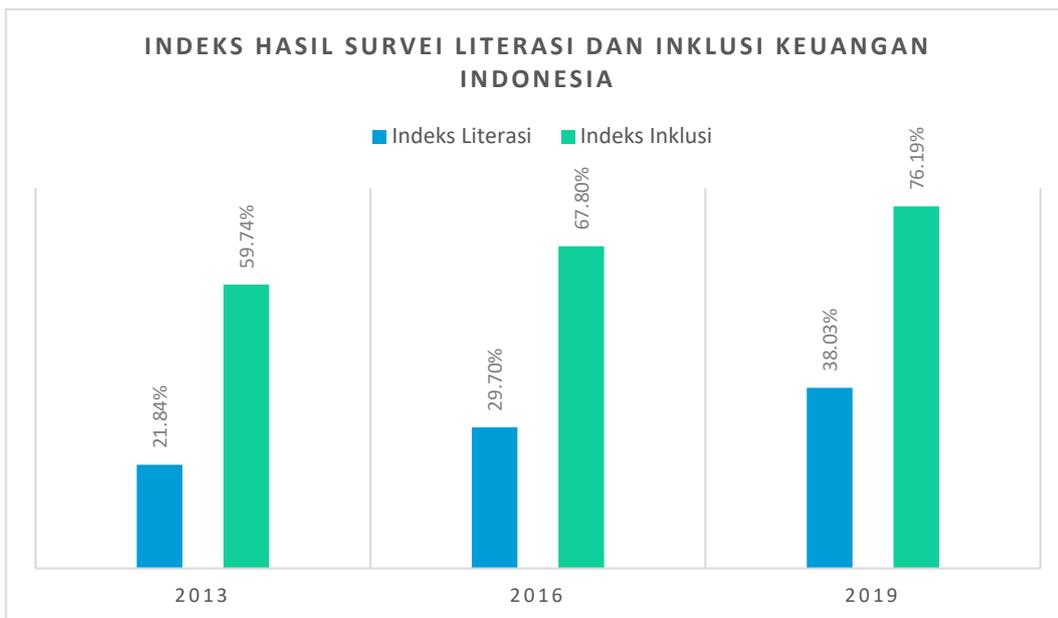
Berkaitan dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Pada Buletin Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Edisi VI Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif disebutkan bahwa faktor yang menghambat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan diantaranya adalah alasan tidak memiliki uang, kemudian karena faktor jarak institusi keuangan yang jauh, mahal biaya rekening, kekurangan dokumen persyaratan, serta sudah ada anggota keluarga yang

memiliki rekening. Sehingga masih banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di lembaga semiformal maupun nonformal, seperti koperasi dan tabungan arisan (Buletin Strategi Nasional Keuangan Inklusif Edisi VI, Juli 2018).

Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saat ini semakin fokus untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan *The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI)* (2010) keuangan inklusif didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dewasa pada usia kerja memiliki akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan finansial formal. Akses yang efektif juga termasuk layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, pada harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia. Masyarakat pada akhirnya diharapkan dapat menggunakan layanan finansial formal daripada layanan finansial informal.

Pada tahun 2013, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai bagian dari *the Trilogy of Policy Instrument* dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (*market confidence*) dan kesetaraan konsumen dan industri jasa keuangan (*level playing field*), namun terjadi dinamika dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pergeseran preferensi masyarakat, serta semakin kompleksnya produk dan layanan jasa keuangan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik kurang disertai dengan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan disparitas antar daerah yang masih lebar.

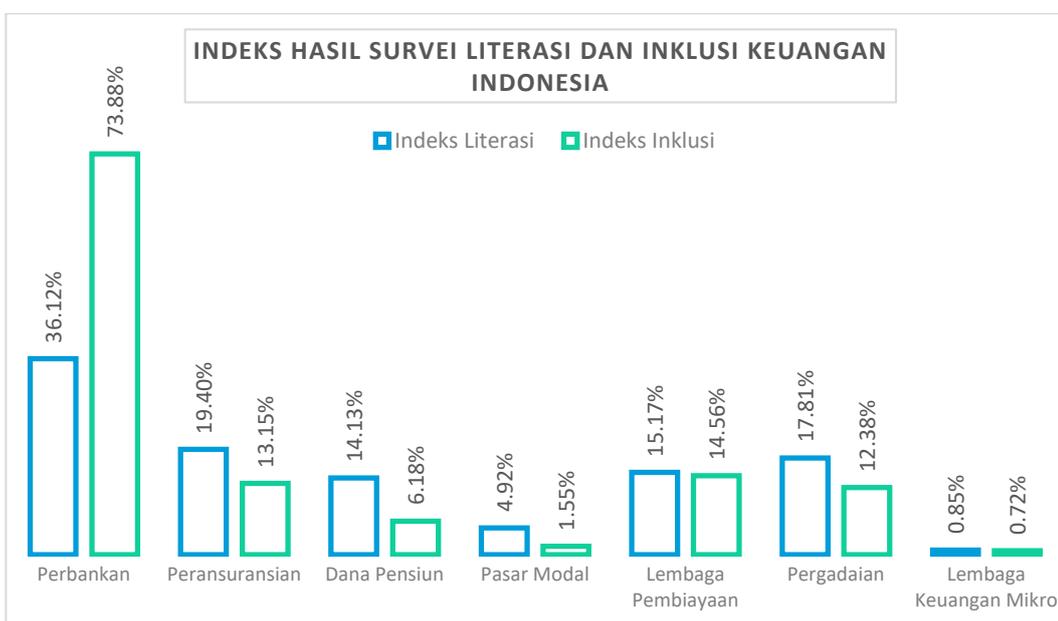
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya 38,03% masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan (*Well Literate*). Meskipun bilangan tersebut merupakan peningkatan atas hasil-hasil survey sebelumnya; 2016: 29,7%; dan 2013: 21.84%, bilangan tersebut dapat mengindikasikan buruknya pemahaman aspek literasi keuangan. Selanjutnya, menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 sebesar 76,19% masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan layanan keuangan. Berikut grafik hasil survei yang dilakukan oleh OJK:



Gambar 1.2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia

(Sumber: Data Diolah Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Dan berikut ini adalah grafik yang menunjukkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan pada masing-masing sektor jasa keuangan pada tahun 2019



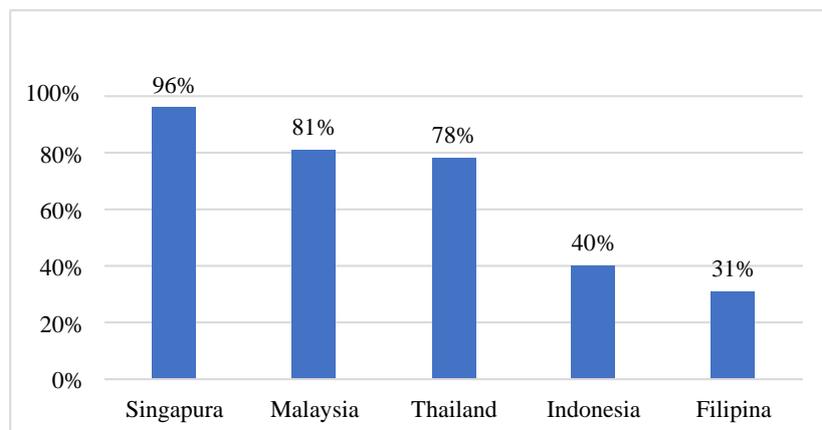
Gambar 1.3 Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019

(Sumber: Data Diolah Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk keuangan di Indonesia masih belum merata pada setiap sektor jasa keuangan.

Terlihat bahwa sektor perbankan memiliki indeks inklusi keuangan yang paling tinggi di antara sektor lainnya yaitu sebesar 73.88 persen dan tingkat literasi keuangan sebesar 36.12 persen. Ini berarti akses layanan keuangan sektor perbankan sudah cukup baik dan masyarakat lebih banyak memilih layanan keuangan melalui sektor perbankan. Menurut *Forum Organization for Economic Co-operation Development (OECD)*, untuk memperkuat sistem keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan integrasi antara inklusi keuangan, literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Literasi keuangan dan inklusi keuangan telah menjadi program pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan agar target indeks inklusi keuangan yang ditargetkan pemerintah dapat tercapai.

Melalui *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat diketahui tingkat persentase akses masyarakat Indonesia terhadap keuangan formal. *Master Plan* ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan tiga anggota negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.



Gambar 1.4 Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Keuangan Formal

(Sumber: Data Diolah Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019)

Berdasarkan Gambar 1.4 tingkat akses keuangan formal masyarakat Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di lingkungan ASEAN dengan persentase sebesar 40%. Sementara persentase Singapura sebesar 96%, Malaysia 81% dan Thailand 78%. Berdasarkan survei yang dilakukan Global Findex pada tahun 2014, jumlah penduduk dewasa, khususnya usia produktif di atas 15 tahun yang mempunyai akun di berbagai macam lembaga keuangan hanya sebesar 35,90%. Hal tersebut menandakan akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan masih relatif rendah, oleh karena itu OJK menargetkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang paham literasi keuangan bertambah menjadi 3,1 juta jiwa hingga akhir tahun 2015. Penduduk usia produktif menurut para ahli adalah penduduk pada kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun. Seseorang masuk dalam usia produktif jika sudah melebihi batasan minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya. Orang-orang yang masih dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa, dan masih terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahaan dapat dikatakan dia adalah usia produktif, hal ini menegaskan bahwa mahasiswa merupakan salah satu demografi yang dapat mengindikasikan suatu segmen dalam naungan definisi usia produktif

Menurut Otoritas Jasa Keuangan masyarakat usia produktif seharusnya berusaha menyisihkan penghasilan untuk kesejahteraan di masa depan ketika mereka pensiun, namun sering kali mereka lupa bahwa masa yang paling menantang adalah ketika mereka memasuki masa pensiun nanti, di mana mereka sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa tua yang tidak kalah besar dibanding pada saat mereka masih berusia produktif, seperti biaya hidup dan juga biaya kesehatan. Sehubungan dengan masih rendahnya tingkat inklusi keuangan Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu menggiatkan program-program guna meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selama ini sudah melaksanakan program-program seperti program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), program Asuransi Mikro, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, penyelenggaraan Keuangan Syariah Fair, dan penerbitan Roadmap SJK Syariah. Hal ini harus

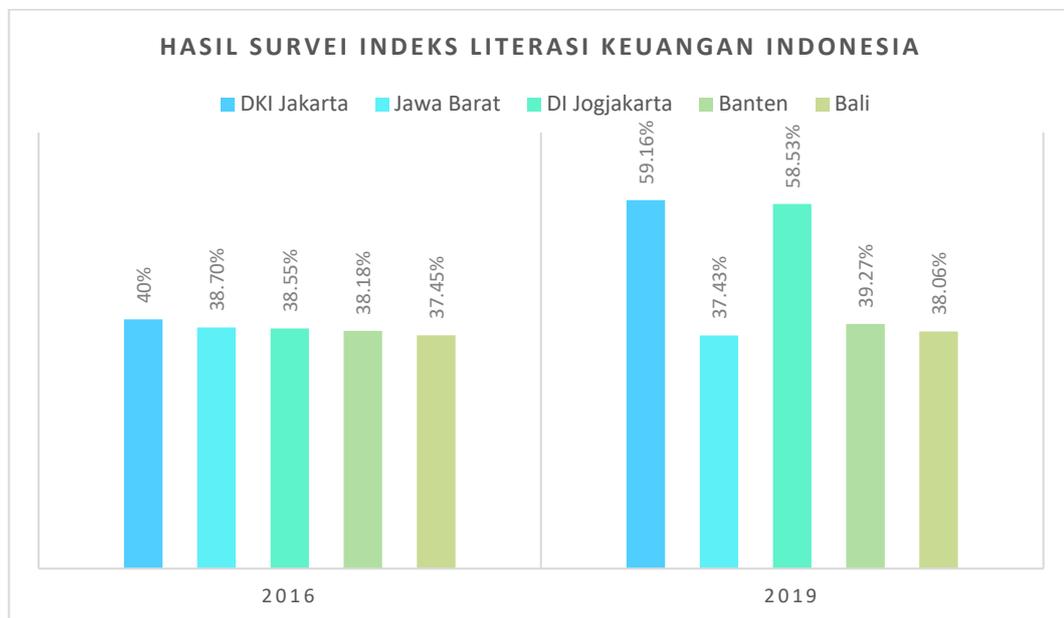
menjadi perhatian bagi OJK karena pemahaman keuangan seseorang tentang literasi keuangan saja belum cukup dalam meningkatkan akses orang tersebut terhadap penggunaan lembaga keuangan, sehingga perlu dilihat faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat inklusi keuangan, salah satunya adalah *self-efficacy*. Perilaku keuangan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor psikologi berupa kemampuan kognitif seperti *self-efficacy* (Ismail et al., 2017).

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku keuangan adalah *self-efficacy* yang digambarkan sebagai tingkat kepercayaan seseorang pada kemampuannya untuk berurusan dengan keuangan (Mindra dan Moya, 2017). *Financial self-efficacy* (FSE) dapat diartikan sebagai teori kognitif sosial yang mengeksplorasi peran pemikiran kognitif dalam membimbing motivasi dan perilaku finansial individu (Sandler, 2000). *Financial self-efficacy* konsisten dengan teori kognitif sosial yang menyatakan bahwa *self-efficacy* memiliki kekuatan prediksi yang lebih besar pada domain yang spesifik dan mempengaruhi tugas atau pilihan individu secara langsung dan juga secara tidak langsung untuk menyadari hal positif yang biasanya diantisipasi individu (Bandura, 2005). Sejalan dengan ini, *self-efficacy* telah digunakan dalam beberapa penelitian sebagai variabel mediasi dan telah diidentifikasi sebagai prediktor yang jauh lebih konsisten dari perilaku dan perubahan perilaku (Zimmerman et al., 1992; Zhao et al., 2005; Bailey dan Austin, 2006). Beberapa studi telah meneliti peran mediasi dari *self-efficacy* pada konteks keuangan, khususnya inklusi keuangan.

Financial efficacy adalah keyakinan positif pada kemampuan untuk berhasil dalam mengelola uang (Brandon dan Smith, 2009). Menurut Sina (2013) *financial efficacy* mampu meningkatkan cara pengelolaan keuangan sehingga kepuasan keuangan dapat dirasakan. Danes dan Haberman (2007), menyatakan bahwa *financial efficacy* memiliki pengaruh pada keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan para remaja. Begitu juga Farrell et al. (2016) menyatakan bahwa *financial efficacy* mampu mempengaruhi pilihan aset investasi wanita. Oleh karena itu, *self-efficacy* adalah atribut dinamis yang dimiliki individu dalam berbagai konteks, dan karenanya dapat diubah oleh perilaku individu tertentu,

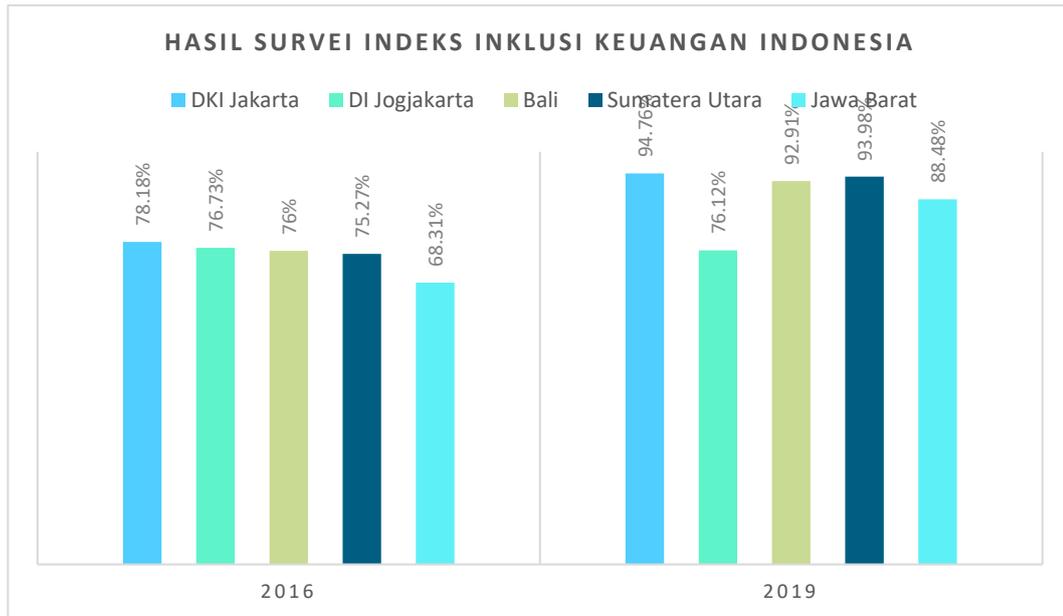
peristiwa biologis dan lingkungan di mana mereka berinteraksi (Stajkovic dan Luthans, 1998).

Menurut survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang berada di atas rata-rata indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan. Salah satu provinsi yang berada pada lima posisi teratas dalam persentase indeks literasi dan inklusi keuangan adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki indeks literasi keuangan sebesar 38,7% berada pada posisi kedua di bawah DKI Jakarta. Sementara indeks inklusi keuangan Provinsi Jawa Barat berada pada posisi kelima-belas sebesar 68,31% di bawah Sulawesi Utara dan Bangka Belitung. Namun, hasil survei 2019 menunjukkan jatuhnya indeks literasi keuangan Jawa Barat menjadi 37,43% menempati peringkat lima-belas dibawah Maluku Utara 37,53%, dan Bali 38,06%. Meskipun peringkat Indeks Literasi Keuangan mengalami penurunan, peringkat Indeks Inklusi Keuangan mengalami kenaikan signifikan menjadi peringkat enam dengan satuan indeks 88,48% dibawah; Banten dengan 92,13%; dan Kalimantan Timur dengan 92,39%. Berikut adalah ilustrasi grafik literasi dan inklusi keuangan Jawa Barat periode 2016-2019:



Gambar 1.5 Hasil Survei Indeks Literasi Keuangan Indonesia

(Sumber: Data Diolah Survei OJK)



Gambar 1.6 Hasil Survei Indeks Inklusi Keuangan Indonesia

(Sumber: Data Diolah Survei OJK)

Jawa Barat sebagai salah satu destinasi wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara membuat wilayah di Jawa Barat mengalami perkembangan ekonomi yang baik. Indeks literasi dan inklusi keuangan di Jawa Barat pun sudah cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Indeks tersebut tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat di Jawa Barat sudah memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang memadai. Terdapat kesenjangan di beberapa daerah, terutama di wilayah Kabupaten diluar wilayah Perkotaan Bandung yang merupakan tujuan wisata oleh wisatawan.

Melihat kondisi kependudukan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dayeuhkolot seperti yang sudah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan pembangunan, salah satunya melalui sektor keuangan. Pemerintah sedang menggiatkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan melakukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi Nasional Keuangan Inklusif dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Selain itu *financial self-efficacy* diharapkan mampu menjadi sarana penghubung dalam peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Penelitian

terdahulu yang meneliti mengenai variabel ini adalah Mindra dan Moya (2017) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa *financial self-efficacy* yang merupakan ukuran kepercayaan individu dalam kemampuan seseorang untuk menggunakan layanan keuangan di Uganda dapat secara parsial memediasi literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat untuk dapat mengakses layanan keuangan, dan dapat secara penuh memediasi sikap keuangan dan inklusi keuangan. Selanjutnya Pratiwi, L. R. E. dan Krisnawati, A. (2020), melakukan penelitian yang berjudul “Peran *Financial Self-Efficacy* Sebagai Mediator Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pada Usia Produktif di Kabupaten Buleleng, Bali”, yang dalam penelitiannya menemukan bahwa *financial self-efficacy* dapat memediasi secara parsial pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan. Penelitian tersebut menjadi dasar pada penelitian ini dan merupakan lanjutan untuk menguji keabsahan premis kausalitas dan relasi antar variabel terkait.

Maka dari itu penulis berharap peran *financial self-efficacy* menjadi sarana penghubung yang akan mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada masyarakat pada Mahasiswa Telkom University, Jawa Barat. Berdasarkan kajian fenomena-fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran *Financial Self-Efficacy* Sebagai Mediator Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan Pada Mahasiswa Telkom University, Jawa Barat”**.

1.3. Perumusan Masalah

Masih rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia membuat Indonesia berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah menggiatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat usia produktif, agar target indeks inklusi keuangan dapat tercapai seperti yang tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Berdasarkan kondisi ekonomi dan kependudukan seperti yang dipaparkan di atas membuat masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan

keuangan formal disertai dengan pengetahuan keuangan yang belum memadai. Oleh karena itu, peran *financial self-efficacy* dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dibutuhkan terlebih pada usia produktif. Danes dan Haberman (2007) juga menemukan bahwa *financial efficacy* merupakan salah satu kunci keberhasilan keuangan karena akan meningkatkan pengelolaan uang yang benar. *Financial Self-Efficacy* diharapkan mampu menjadi sarana penghubung dalam peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan sehingga dapat membantu pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya pada Mahasiswa Telkom University, Jawa Barat.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah Tingkatan Literasi Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Financial Self-Efficacy*?
2. Apakah Tingkatan Literasi Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkatan Inklusi Keuangan?
3. Apakah Variabel *Financial Self-Efficacy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkatan Inklusi Keuangan?
4. Apakah Variabel *Financial Self-Efficacy* dapat memediasi pengaruh tingkatan Literasi Keuangan terhadap tingkatan Inklusi Keuangan?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Tingkatan Literasi Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Financial Self-Efficacy*
2. Untuk mengetahui apakah Tingkatan Literasi Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkatan Inklusi Keuangan
3. Untuk mengetahui apakah Variabel *Financial Self-Efficacy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkatan Inklusi Keuangan?
4. Untuk mengetahui apakah Variabel *Financial Self-Efficacy* dapat memediasi pengaruh tingkatan Literasi Keuangan terhadap tingkatan Inklusi Keuangan

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dilihat dari aspek praktis dan akademis sebagai berikut:

1.6.1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan agar dapat menjadi masukan dalam membuat program-program di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan khususnya pada Mahasiswa Telkom University, Jawa Barat. Selain itu juga diharapkan agar penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot.

1.6.2. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi, diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti yang akan melakukan maupun mengembangkan penelitian sejenis.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan yang bertujuan untuk mencegah permasalahan meluas dan menjaga konsistensi dari tujuan peneliti. Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1.7.1. Variabel Penelitian

Variabel independen penelitian ini adalah literasi keuangan, variabel dependen atau variabel hasilnya adalah inklusi keuangan, dan variabel mediasinya adalah *financial self-efficacy*. Pertanyaan dalam variabel penelitian ini disesuaikan dengan keadaan objek penelitian.

1.7.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Dayeuhkolot, Jawa Barat. Objek penelitiannya adalah Mahasiswa Telkom University, Jawa Barat.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan dari literatur penelitian yang berkaitan dengan teori penelitian yang mendukung solusi permasalahan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan yaitu variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang berfokus pada hasil olahan data sesuai dengan metode yang digunakan. Interpretasi hasil analisis dari objek penelitian sesuai dengan pengujian yang dilakukan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan sebagai rekomendasi yang bermanfaat baik bagi objek penelitian maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.